

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Fenomena calon tunggal atau kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024 yang dianalisis menggunakan teori partisipasi politik menurut Herbert McClosky serta Verba & Nie (1972), yang mencakup dimensi orientasi kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku (aksi politik), serta analisis terhadap faktor-faktor penyebab munculnya pasangan calon tunggal dalam kontestasi tersebut. Dari dimensi orientasi kognitif, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Batang Hari yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hak memilih kolom kosong, terutama pada pemilih usia lanjut.

Sosialisasi dari KPU memang telah dilakukan, namun belum menjangkau secara merata seluruh lapisan masyarakat. Minimnya informasi yang diterima membuat banyak pemilih menganggap bahwa kotak kosong tidak dapat dipilih, sehingga secara tidak langsung memberikan keunggulan pada calon tunggal yang fotonya terpampang di surat suara. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit pengetahuan politik warga yang turut berdampak pada kualitas demokrasi lokal. Pada dimensi orientasi afektif, masyarakat menunjukkan rasa kecewa dan frustrasi karena tidak memiliki alternatif pilihan dalam Pilkada. Kekecewaan ini tercermin dari data partisipasi, di mana lebih dari 64 ribu pemilih tidak datang ke TPS, dan lebih dari 32 ribu memilih kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik yang ada.

Tingginya angka golput dan pemilih kotak kosong menunjukkan bahwa secara emosional, masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses demokrasi yang

sehat, dan merasa kecewa atas situasi politik yang terkesan telah diatur sejak awal. Dari sisi orientasi evaluatif, mayoritas masyarakat menilai bahwa terjadinya calon tunggal mencerminkan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi. Tidak hadirnya figur alternatif yang bisa bertarung melawan petahana merupakan indikasi lemahnya institusi partai dalam menjaring dan menyiapkan calon pemimpin baru. Selain itu, adanya koalisi besar yang terdiri dari 9 partai pendukung petahana memperkuat anggapan publik bahwa ada kompromi elit dan kepentingan pragmatis yang menyingkirkan semangat kompetisi.

Hal ini dinilai sebagai bentuk penurunan kualitas demokrasi lokal karena menghilangkan prinsip dasar pemilu yaitu adanya pilihan dan kompetisi. Sementara itu, dalam dimensi perilaku (aksi politik), munculnya kelompok masyarakat yang membentuk tim kampanye kotak kosong menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap demokrasi. Mereka menggunakan hak pilih untuk mengampanyekan kolom kosong sebagai bentuk protes damai dan perlawanan terhadap situasi politik yang tidak sehat. Fakta bahwa kolom kosong menang di beberapa daerah lain pada Pilkada serentak 2020 menjadi bukti bahwa aksi nyata dari masyarakat bisa menjadi alat kontrol terhadap dominasi politik elit.

Dari seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya elektabilitas petahana, tetapi juga oleh melemahnya fungsi partai politik, dominasi koalisi nasional seperti Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), serta absennya figur kompetitor akibat perhitungan politik dari rival sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa demokrasi lokal masih sangat rentan terhadap

hegemoni elit politik dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi rakyat yang substantif. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem politik lokal, penguatan partai politik dalam pengkaderan, serta peningkatan literasi politik masyarakat agar demokrasi ke depan lebih sehat dan kompetitif.

4.2 Saran

Berikut saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena calon tunggal dan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2024:

4.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini mengandalkan teori partisipasi politik dari Herbert McClosky serta Verba & Nie, yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi: kognitif, afektif, evaluatif, dan perilaku. Teori ini terbukti relevan dalam menganalisis fenomena minimnya pilihan politik dalam pilkada calon tunggal dan respons masyarakat terhadapnya. Namun demikian, untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar teori partisipasi ini dikombinasikan dengan pendekatan lain seperti teori hegemonik kekuasaan atau teori elite pluralism, untuk menggali lebih dalam bagaimana dominasi elit dan konsensus elit berperan dalam mereduksi ruang kompetisi politik. Pendekatan multidimensi ini akan memperkaya pemahaman tentang penyebab struktural dan kultural dari melemahnya demokrasi lokal.

4.2.2 Saran Praktis

Bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, perlu dilakukan peningkatan kualitas sosialisasi secara menyeluruh dan inklusif, khususnya menyoar kelompok pemilih rentan seperti lansia, pemula, dan masyarakat

desa yang akses terhadap informasi politik masih terbatas. Sosialisasi mengenai keberadaan dan makna kotak kosong harus diperjelas dan diperluas agar partisipasi politik dapat dilakukan secara sadar dan bermakna. Untuk partai politik, diperlukan revitalisasi peran sebagai lembaga pengkader pemimpin. Partai tidak hanya menjadi kendaraan pragmatis, tetapi harus menjalankan fungsi ideologis dan kaderisasi yang mumpuni agar muncul alternatif kepemimpinan di daerah. Selain itu, masyarakat sipil juga perlu diperkuat agar mampu menjadi pengawas, pengkritik, sekaligus penggerak dalam menjaga kualitas demokrasi lokal agar tidak semata dikendalikan oleh kompromi elit.